



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisiensi dan ber sasaran, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
 3. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Seri D Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 52 Seri D Nomor 32)
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33)
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Bahwa Pemerintahan Negara dibentuk dalam rangka melindungi segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan Ketertiban Dunia.

Untuk terwujudnya tujuan tersebut diatas, maka tugas Pemerintah selanjutnya adalah dengan mengisi, melaksanakan dan menyempurnakan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi sebagaimana yang diharapkan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun suatu perencanaan.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas merupakan pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah berada dalam satu kesatuan/sinergis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG**

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2007

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005 ± 2025**

I. PENDAHULUAN

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Pengertian | 5 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 | Landasan | 6 |
| 1.5 | Tata Urut | 7 |

II. KONDISI UMUM

| | | |
|-------|--|----|
| 2.1 | Kondisi Saat Ini | 9 |
| 2.1.1 | Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama | 9 |
| 2.1.2 | Ekonomi | 14 |
| 2.1.3 | Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni | 17 |
| 2.1.4 | Sarana dan Prasarana | 18 |
| 2.1.5 | Politik | 23 |
| 2.1.6 | Ketentraman dan Ketertiban | 24 |
| 2.1.7 | Hukum dan Aparatur | 26 |
| 2.1.8 | Wilayah Tata Ruang | 29 |
| 2.1.9 | Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup | 30 |
| 2.2 | Tantangan | 32 |
| 2.2.1 | Sosial Budaya dan Kehidupan | 32 |
| 2.2.2 | Ekonomi | 36 |
| 2.2.3 | Ilmu Pengetahuan & Teknologi | 39 |
| 2.2.4 | Sarana dan Prasarana | 40 |
| 2.2.5 | Politik | 42 |
| 2.2.6 | Ketentraman dan Ketertiban | 43 |
| 2.2.7 | Hukum dan Aparatur | 43 |
| 2.2.8 | Wilayah dan Tata Ruang | 44 |
| 2.2.9 | Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup | 45 |

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025

| | | |
|-----|------------|----|
| 3.1 | Visi | 47 |
| 3.2 | Misi | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, ditetapkan bahwa Daerah Lampung berstatus sebagai Keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

Status Daerah Lampung sebagai Keresidenan dari Provinsi Sumatera Selatan berlangsung sampai Tahun 1964.

Untuk lebih mengintensifkan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan usaha-usaha untuk memperjuangkan keresidenan Lampung menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, keinginan tersebut terwujud, dimana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Masyarakat Lampung sebagai bagian dari Bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan selama 60 tahun sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. dengan perjuangan yang berkesinambungan Bangsa Indonesia telah berhasil mengatasi berbagai ujian yang sangat berat, yakni Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara. Persatuan dan Kesatuan Bangsa berhasil dipertahankan dengan mengatasi berbagai persoalan bangsa dalam bentuk pertikaian, baik pertikaian bersenjata maupun pertikaian politik antara sesama komponen bangsa. Pada periode itu para pemimpin bangsa berhasil menyusun rencana pembangunan nasional. Namun, persoalan Bangsa telah menciptakan suasana penuh ketegangan dan pertikaian telah menyebabkan rencana-rencana tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Provinsi Lampung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga mengalami dampak dari situasi nasional tersebut.

1.5 TAT A URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pengantar, pengertian, Maksud dan Tujuan, Landasan, dan Tata urut Penulisan.

Bab II. KONDISI UMUM

Bab ini berisi tentang deskripsi kondisi umum daerah saat ini, yang memuat antara lain kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, pertahanan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup; tantangan yang dihadapi; serta modal dasar yang dimiliki.

Bab III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025.

Bab ini memaparkan Visi dan Misi Provinsi Lampung yang menjadi orientasi utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program Pembangunan Provinsi Lampung selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Bab IV. SASARAN, ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025.

Bab ini memuat arah pembangunan jangka panjang, tahapan dan prioritas yang akan menjadi acuan atau pedoman penyusunan program pada rencana pembangunan jangka menengah.

Bab V. PENUTUP

Bab ini memaparkan peranan RPJP sebagai pedoman bagi stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; sebagai koridor dalam penyusunan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah; dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

kelahiran dan kematian balita 64 per 1.000 kelahiran hid LIP. Angka-angka ini masih cukup tinggi karena berada di atas rata-rata nasional. Disamping itu kekurangan gizi terutama pada balita masih menjadi masalah besar dalam rangka membentuk generasi yang maju dan sejahtera pada masa yang akan datang. Sebaliknya angka harapan hidup telah mencapai 66,2 tahun (2003). Pemakaian air bersih telah mencapai 75,82 (dan penggunaan jamban sehat mencakup 65t71 (2005). Keluarga berencana tercatat dari 1.380.636 pasangan usia subur (PUS) terdapat 961.460 (69,64 %) aktif menggunakan berbagai jenis alat kontrasepsi.

- 5 Kondisi kesejahteraan masyarakat Lampung dilihat melalui angka kemiskinan di daerah Lampung pada tahun 2001 sebesar 31,25 % dengan laju pertumbuhan penduduk miskin sebesar 4,09 %, lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk miskin pada periode tahun 1996-1999 sebesar 5,96 %, sehingga laju pertumbuhan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk Lampung menjadi -3,76 % pada tahun 2001. Perkembangan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera dilihat melalui Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (KPS AE) pada tahun 2000 sebanyak 443.916 KK (28,71 %) dan pada tahun 2003 menjadi 485.481 KK (29,13 %), sedangkan pada tahun 2004 sebesar 510.885 KK (29,92 %), jumlah Keluarga Pra Sejahtera Non Alasan Ekonomi (KPS NAE) tahun 2000 mencapai 135.405 KK (8,76 %), dan tahun 2003 menjadi 149.514 KK (8,97 %), sedangkan tahun 2004 sebesar 152.276 KK atau 8,92 %, Jumlah Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi (KSI AE) tahun 2000 dilaporkan sebesar 284.941 KK (18,43 %), dan berubah menjadi 298.626 KK (17,92 %) pada tahun 2003, serta menjadi 309.009 KK (18,10 %) pada tahun 2004 dan jumlah Keluarga Sejahtera I Non Alasan Ekonomi (KSI NAE) tahun 2000 sebesar 188.965 KK (12,22 %) dan 215.308 KK (12,92 %) pada tahun 2003, serta menjadi 213.182 KK (12,48 %) pada tahun 2004.
- 6 Taraf pendidikan penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang tercermin dari tingkat melek huruf yang terus meningkat. Demikian pula angka partisipasi sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun mengalami peningkatan, sedangkan angka partisipasi sekolah kelompok umur 13-15 tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan masih tingginya angka putus sekolah pada sekolah lanjutan tingkat atas. Data tahun 2005 tercatat APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 100 %; yang berarti bahwa seluruh anak umur 7-12 tahun sudah dapat mengikuti pendidikan di sekolah, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 87 %; yang diharapkan pada tahun 2009 seluruhnya telah mengikuti pendidikan di sekolah dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 48,16 %, yang diharapkan pada tahun 2005 seluruhnya sudah mengikuti pendidikan di sekolah. Di tingkat pendidikan tinggi, jumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan program studi sangat memadai meskipun masih terdapat disparitas yang tinggi antar perguruan tinggi, khususnya dalam kualitas proses pembelajaran.

2.1.2 Ekonomi

- 1 Kondisi perekonomian Lampung yang cukup kondusif pada tahun-tahun sebelumnya mendorong perkembangan investasi yang mengakibatkan perekonomian Provinsi Lampung dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 % pada tahun 2004 dari 3,76 % pada tahun 2005. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,07 %, menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Sektor primer masih dominan dalam perekonomian Provinsi Lampung. Produksi tanaman pangan utama (padi, jagung, ubi kayu) masing-masing mencapai 2.129.914 ton GKG, 1.183.982 ton pipilan kering, dan 5.499.403 ton umbi basah; sedangkan nenas mencapai 3.042.155 ton/tahun terbesar di Indonesia. Kopi Lampung sudah dikenal di dunia, tetapi produktivitas kopi Lampung rata-rata hanya 800 kg/ha. Komoditas ekspor di daerah Lampung umumnya berasal dari produk-produk pertanian serta perikanan seperti kopi, udang segar, lada, damar, pisang segar, gaplek, biji kakao, dan sebagainya. Sedangkan ekspor hasil produk industri daerah antara lain nenas kaleng, monosodium glutamat, particle board, gula tetes, minyak sawit, kayu lapis, karet, kopi bubuk, dan lain sebagainya. Sedangkan impor didominasi oleh impor kimia, mesin-mesin dan biji-bijian yang secara umum merupakan bahan baku kegiatan industri dan pertanian daerah.
- 2 Realisasi investasi PMDN tumbuh dengan laju 11,45% dengan nilai 10,5 Triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi PMA mencapai 824 juta US\$. Proporsi realisasi dari rencana investasi PMDN mencapai 73%, sedangkan realisasi dari PMA hanya berkisar 33%. Ini menunjukkan bahwa investor di Provinsi Lampung sebagian berasal dari penanam modal dalam negeri. Pada sisi lain, hal ini juga memberikan gambaran masih adanya kendala bagi investor asing untuk melakukan investasi di Provinsi Lampung.
- 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2006 PAD Lampung mencapai Rp. 479,8 Miliar. Kapasitas fiskal daerah Lampung juga terus meningkat. Tahun 2006 kapasitas fiskal mencapai Rp. 1,06 Triliun, sedangkan dana perimbangan pada tahun 2006 mencapai Rp 581,71 Miliar (DAU dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak SDA). Pada tahun-tahun mendatang, dengan semakin meningkatnya PAD, maka peranan DAU terhadap kapasitas fiskal daerah diperkirakan akan semakin menurun.
- 4 Provinsi Lampung merupakan wilayah pertanian. Ketahanan pangan telah memadai pada periode 1995-2005 dengan stok surplus untuk cadangan beras berada pada kisaran 89 ribu - 380 ribu ton. Produktivitas padi sawah berkisar 4,3 - 4,5 ton GKG/Ha, produktivitas jagung pada kisaran 2,2-3,3 ton pipilan kering/Ha, dan ubikayu berkisar 20-35 ton umbi basah/ha. Meskipun cenderung menurun, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB (atas dasar harga berkala) dalam periode 2000-2004 masih tetap paling besar, yaitu berkisar 45,30% (2000) - 38,59% (2004). Provinsi Lampung juga dikenal sebagai produsen sapi potong utama di Indonesia dengan populasi sapi mencapai 394.591 ekor. Produksi udang Lampung terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 30% dari total ekspor udang nasional. Meskipun Provinsi Lampung juga dikenal dengan lada hitam, namun saat ini komoditas tersebut semakin

3. Dinamika masyarakat Lampung juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada berbagai bidang kehidupan. Jumlah LSM bergerak dalam bidang tertentu sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai 69 buah. Perkembangan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan/LSM saat ini semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta semakin menunjukkan kedewasaan dalam berorganisasi. Ini terlihat melalui hubungan interaksi organisasi dengan masyarakat, baik dalam penyerapan aspirasi maupun dalam advokasi dalam menyampaikan aspirasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pelayanan publik. Dinamika kegiatan ormas dan LSM juga diperlihatkan dengan berfungsinya kontrol terhadap kinerja Pemerintah Daerah maupun DPRD.
4. Dalam rangka mendorong dan menjaga iklim politik serta memantapkan budaya politik menuju demokratisasi, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut : melaksanakan dialog politik; sarasehan dan dialog antar generasi; meningkatkan wawasan gender dan bahaya narkoba bagi organisasi kewanitaan; membentuk Forum Komunikasi Politik; melaksanakan pembaruan; dan memfasilitasi berbagai kegiatan LSM.

2.1.6 Ketentraman dan Ketertiban

1. Sebagai daerah yang mempunyai karakter majemuk secara sosial budaya, Provinsi Lampung pernah mengalami berbagai konflik, meskipun dalam skala yang tidak besar. Latar belakang pemicu konflik cukup beragam, mulai dari persoalan politik, ekonomi, maupun SARA. Beberapa konflik yang pernah mencuat ke permukaan, antara lain: kasus Way Jepara; Padang Ratu; daerah sentra industri perkebunan dan pemukiman transmigrasi di Lampung Utara; Way Kanan; Tulang Bawang; Lampung Tengah; Lampung Timur; Lampung Selatan; serta eks reklamasi Rawa Sragi.
2. Pasca krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, di Provinsi Lampung juga terjadi kerawanan sosial. Terjadinya PHK secara massal telah menyebabkan timbulnya pengangguran dan kembalinya pekerja urban dari kota ke desa. Kondisi ini menyebabkan tumbuhnya kerawanan di berbagai pelosok desa karena secara psikologis, penduduk urban yang kembali ke desa merasa lebih mengetahui dari penduduk desanya dan secara tidak langsung menciptakan situasi yang kurang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyebab kerusuhan yang sangat kecil sekalipun akan sangat mungkin mencuat menjadi permasalahan yang besar karena kompleksnya masalah dan himpitan ekonomi.
3. Parameter lain untuk menilai kondisi kamtibmas di Provinsi Lampung adalah tingkat upaya pemberantasan penyalagunaan psikotropika dan Napza. Pada tahun 2004 telah terjadi penurunan kasus sebesar 31,1% dari tahun sebelumnya. Ini terjadi karena adanya peningkatan operasi yang dilakukan oleh kepolisian secara rutin, serta bekerjasama dengan aparat terkait. Penurunan berbagai kasus tindak pidana lain juga diwujudkan melalui operasi terpadu yang dilakukan oleh Kepolisian di Provinsi Sumsel, Banten, dan Jakarta.

pengawasan fungsional (Bawasda) pada tahun 2005 telah berhasil mencegah kerugian negara sebesar Rp. 5,8 Milliar.

2.1.8 Wilayah dan Tata Ruang

1. Kondisi topografi Daerah Lampung terbagi dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu : (a) daerah topografi berbukit sampai bergunung; (b) berombak sampai bergelombang; (c) dataran alluvial; (d) dataran rawa pasang surut; (e) daerah aliran sungai (river basin). Terdapat 69 buah pulau-pulau besar dan kecil, diantaranya terdapat 49 buah pulau di Kabupaten Lampung Selatan dengan pulau-pulau terbesar, yaitu di Pulau Sebesi (2.472 Ha), Pulau Legundi (1.820 Ha), Pulau Sebuku (1.771 Ha), Pulau Rakata (1.343 ha), dan Pulau Sertung dan gugusan kepulauan Krakatau (1.057 Ha), serta Pulau Pahawang (669 Ha). Di Kabupaten Lampung Barat terdapat dua buah pulau yaitu Pulau Pisang (142 Ha) dan Pulau Butuah (63 Ha). Di Kabupaten Tanggamus terdapat 10 pulau dan yang terbesar adalah Pulau Tabuan (19.374 Ha), serta di Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) buah pulau yaitu Pulau Pasaran (6 Ha).
2. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1964, luas wilayah Provinsi Lampung adalah 3.528.835 Ha. Dengan rincian penggunaan lahan terdiri atas perkampungan seluas 245.931 Ha (7,45%), sawah 290.824 Ha (8,81%), tegalan/ladang 676.824 Ha (20,50%), perkebunan 690.803 Ha (20,92%), kebun campuran 366.419 Ha (1,90%), alang-alang 89.476 Ha (2,71%), hutan 833.847 Ha (25,26%), rawa dan danau 15.692 Ha (0,48%), tambak 42.251 Ha (1,28%) dan penggunaan lahan lainnya 49.478 Ha (1,50%). Sedangkan menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), luas wilayah Provinsi Lampung adalah 3.301.545 Ha dengan penggunaan lahannya terdiri atas perkampungan 248.109 Ha (7,51%), sawah 284.664 Ha (8,26%), tegalan/ladang 675.860 Ha (20,47%), perkebunan 703.945 Ha (21,32%), kebun campuran 227.866 Ha (6,90%), alang-alang 90.164 Ha (2,73%), hutan 1.004.735 Ha (30,43%), rawa dan danau 15.591 Ha (0,47%), tambak 33.844 Ha (1,03%), dan penggunaan lainnya 16.767 Ha atau 0,51%.
3. Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian di Provinsi Lampung sebesar 1,08 hektar; yang berarti lebih rendah dari rata-rata Sumatera (1,33 hektar) dan Luar Jawa (1,31 hektar); tetapi masih lebih tinggi dari rata-rata di Jawa (0,41 hektar) dan nasional (0,81 hektar). Jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar atau petani gurem mencapai 26,62%.

2.1.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung menurut SK Menhutbun Nomor : 256/KPTS/II/2000 dan Perda Nomor 5/2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung tercatat seluas 1.004.735 Ha (BPS, 2003) atau 30,43% dari total luas wilayah Lampung. Menurut statusnya, luas areal kawasan hutan ini terdiri atas : Hutan lindung seluas 317.615 Ha (31,6%), Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 462.030 Ha (46%), Hutan Produksi Terbatas 33.358 Ha (3,32%) dan Hutan Produksi Tetap

3. Tantangan pada infrastruktur transportasi meliputi : perlunya strategi pemanfaatan sistem infrastruktur agar Provinsi Lampung berkembang menjadi pusat pelayanan barang dan jasa bagi Indonesia wilayah barat ASEAN, global; serta perlunya pengembangan teknologi transportasi terpadu antar modal dan intra modal yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu perlu dikembangkan kapasitas kelembagaan, peraturan, dan iklim kompetisi yang sehat dalam pelayanan transportasi publik.
4. Tantangan prasarana pemukiman meliputi upaya mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh; peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana permukiman (air bersih, kesehatan lingkungan, dan jalan lingkungan); pengembangan subsidi sektor perumahan melalui kredit Lunak; serta perlunya peningkatan fungsi daerah perkotaan (urban) sebagai penggerak pembangunan subur dan atau hinterland dan daerah pedesaan.
5. Pada era globalisasi, tantangan bidang pos dan telematika adalah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi, perlu peningkatan dan penyebaran arus informasi dan teledensitas pelayanan pos dan telematika bagi masyarakat; perlunya percepatan arus informasi pembangunan guna pengembangan daerah melalui pemanfaatan E - Government berbasis IT menuju terciptanya Good Governance.
6. Tantangan energi adalah perlunya pembiayaan kompetitif dan insentif dalam rangka pengembangan pembangkit tenaga listrik, terutama di perdesaan; pengembangan potensi sumber energi baru dan terbarukan; perlunya pembiayaan kompetitif dan insentif bagi pembiayaan dalam rangka pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama Bahan Bakar Nabati (BBN).

2.2.5 Politik

1. Beranekaragamnya penduduk Lampung dari segi agama dan suku bangsa jika tidak dibina akan menjadi potensi kelemahan yang dapat menimbulkan konflik SARA dan politik. Perubahan situasi politik nasional memberikan implikasi kompleks dalam kehidupan politik di daerah.
2. Tantangan terberat dalam 20 tahun kedepan adalah menjaga konsolidasi politik secara berkelanjutan, berupa reformasi struktur politik; penyempurnaan proses politik; pengembangan budaya politik yang lebih demokratis. Tantangan lain adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan secara profesional.
3. Tantangan lain adalah bagaimana melembagakan, kebebasan pers/media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Akses masyarakat yang bebas dan terbuka akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik.

2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing daerah maupun antar daerah. Melalui pemanfaatan potensi dan peluang keunggulan masing-masing daerah berdasarkan keunggulan lokal, dalam rangka mendukung daya saing nasional.

2.2.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Tantangan terberat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup adalah kemungkinan terjadinya 3 (tiga) ancaman, yakni : krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Oleh karena itu perlu upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam daratan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.
2. Tantangan yang rill di daerah adalah perusakan hutan dan berbagai bentuk alih fungsi kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sampai pada taraf yang membahayakan; serta adanya degradasi kawasan hutan dan lahan budidaya yang mengakibatkan perbedaan debit air sungai pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup besar. Tantangan terbesar lain adalah bagaimana mengarahkan akses kegiatan ekonomi masyarakat ke hutan konservasi dan hutan lindung agar menjadi tumbuh dan lestari.
3. Kondisi hidrologis yang terus memburuk memberlkan ancaman terjadinya kekurangan air yang serius pada musim kemarau dan menyebabkan banjir pada musim hujan serta kecenderungan pemanfaatan air tanah tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan yang berakibat pada menurunnya ketahanan air tanah.
4. Pada sisi lain pengembangan industri dapat mengakibatkan penurunan kualitas air di perairan umum dan pencemaran perairan di wilayah laut.
5. Proses pemanasan global dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap aktivitas dan kehidupan manusia serta kelestarian plasma nutfah lokal. Selain itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang secara optimal sehingga belum dapat menghasilkan nilai tambah sebagai alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati.
6. Adanya ancaman global diberlakukannya ekolabel bagi produk- produk primer unggulan yang berbasis sumberdaya lahan.

keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Menjadi provinsi yang maju diantara provinsi di Indonesia adalah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung. Pemahaman untuk menjadi Lampung maju memiliki pengertian bahwa masyarakat Lampung sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumber daya wilayah dan sumber daya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan. Namun karena pemahaman kemandirian bukanlah keterisolasian maka ketergantungan pada wilayah Provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu keniscayaan.

Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi. Mengingat pada tahun 2005 pendapatan per kapita penduduk Lampung menduduki urutan terendah diantara semua provinsi yang ada di Sumatera. Desa tertinggal yang ada di Lampung masih besar mencapai porsi seperempat dari jumlah penduduk yang ada. Pengangguran yang tinggi mencapai tiga persen dari jumlah penduduk. Kondisi ini paradok dengan potensi atau kekayaan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Lampung dan kedekatan dengan pusat ekonomi nasional DKI Jakarta yang dapat ditempuh dalam waktu 25 menit melalui pesawat udara dan enam jam dengan modal transportasi darat dan Laut. Kondisi ini menjadi motivasi untuk mencapai visi menjadi provinsi maju dengan merancang strategi pembangunan yang memungkinkan untuk terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi yang konsisten dan persisten. Masyarakat Lampung akan memanfaatkan secara optimal segala bentuk peluang dan kesempatan pada wilayah lain di Indonesia bahkan di luar negeri untuk kemajuan demi terwujudnya masyarakat yang makmur. Pada era globalisasi sekarang masyarakat Lampung akan meningkatkan kemampuan dari yang sudah ada dalam mekanisme perdagangan bebas. Sebagai bangsa pejuang, semua elemen pemangku kepentingan akan berjuang secara proaktif untuk keluar dari keterpurukan sehingga menjadi sejajar dengan masyarakat yang lebih maju dalam Provinsi diluar Lampung dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk menjadi maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (entrepreneurship government), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan akan berimplikasi pada kemakmuran. Kemakmuran hanya dicapai oleh manusia berkualitas, oleh karena itu menciptakan manusia yang berkualitas adalah tujuan pokok. Sentral dari pembangunan adalah manusia, oleh karena itu kehandalan strategi peningkatan sumber daya manusia akan menjamin terwujudnya penduduk yang berkualitas. Sumber daya manusia berkualitas memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya

3.2 Misi

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi direction untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005-2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut :

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Misi-1 : Menumbuhkembangkan dan Pemeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global.

Misi ini adalah upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

Kebijakan pemerataan ekonomi harus tercermin pada proporsi aset produktif seperti tanah oleh UKM. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Misi-2 : Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.

Misi ini adalah upaya menambah dan meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energi dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi regional dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan sosial, terutama kebutuhan dasar masyarakat juga diorientasikan untuk menarik investasi.

Misi- 7 : Mewujudkan Pemerintah yang bertatakelola baik dan Berorientasi Kewirausahaan.

Misi ini adalah upaya mewujudkan pemerintahan daerah bertata kelola baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih (bebas KKN), berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional. Dalam kaitan ini perlu diperkuat desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah serta keserasian dan keterpaduan pembagian tugas pelayanan antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mewujudkan pemerintahan daerah yang berorientasi pada kewirausahaan (entrepreneurial government) yang mendorong inovasi dalam manajemen pemerintahan untuk pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha.

BABIV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025

Pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 bertujuan mewujudkan masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung 20 tahun ke depan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera adalah sebagai berikut:

4.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung 20 tahun ke depan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Lampung maju dan sejahtera tersebut adalah sebagai berikut :

4.1.1 Terwujudnya ekonomi daerah yang kuat yang berorientasi nasional dan global

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tinggi secara berkelanjutan, yang mencapai 7,5 % pertahun pada tahun 2025.
2. Pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Lampung meningkat secara berkesinambungan hingga mencapai sekitar US\$ 6.000 pertahun pada tahun 2025.
3. Tingkat pengangguran penduduk rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 %.
4. Iklim investasi semakin baik dengan diindikasikan oleh realisasi investasi dalam negeri dan luar negeri semakin tinggi.
5. Struktur perekonomian daerah Lampung kokoh dan tangguh, mula-mula berbasis pertanian dalam arti luas, termasuk agro industri, kemudian

8. Pelayahan telematika (ICT) yang handal dan efisien sehingga terwujud masyarakat informasi di seluruh pelosok Provinsi Lampung.

4.1.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing Tinggi, Menguasai IPTEKS, Sehat, dan Sejahtera.

1. Kualitas SDM masyarakat Provinsi Lampung meningkat, ditandai oleh IPM dan IPG yang tinggi. Tingkat pendidikan penduduk rata-rata tinggi dan merata.
2. Penguasaan dan penciptaan IPTEK5 semakin tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Derajat kesehatan masyarakat rata-rata tinggi, ditandai oleh angka harapan hidup yang tinggi.
4. Instrumen jaminan kesehatan untuk keluarga miskin tersedia memadai.
5. Instrumen jaminan pangan untuk tiap rumah tangga yang aman dan kualitas gizi yang memadai.
6. Laju pertumbuhan penduduk menurun menuju keseimbangan, ditandai oleh NRR- 1 atau TFR - 2,1.
7. Kualitas tenaga kerja kompetitif dalam persaingan nasional dan global, serta hak memperoleh perlindungan dan tingkat kesejahteraan tinggi.
8. Peran serta dan pengurusan utama gender dalam pembangunan meningkat, baik kuantitas maupun kualitas.
9. Kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang (ekonomi, sosial, politik, budaya) semakin tinggi.
10. Budaya dan prestasi olahraga masyarakat Lampung meningkat.
11. Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial meningkat.

4.1.4 Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Berbudi Luhur, dan Berbudaya, serta Mampu Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah

1. Masyarakat bermoral tinggi, yang dicirikan oleh watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi pada kemajuan IPTEKS.
2. Budaya daerah yang mantap, tercermin dari meningkatnya harkat dan martabat, peradaban, dan jati diri, serta kepribadian masyarakat.
3. Karakter masyarakat Lampung yang tangguh dan kompetitif, yang mampu berpikir positif dan kondusif terhadap perubahan dan modernisasi.
4. Aspek-aspek positif dari nilai-nilai luhur dan budaya daerah teraktualisasi dalam karakter masyarakat Lampung.
5. Tradisi, tata nilai, dan seni daerah terinventarisasi dan dilestarikan sebagai cagar budaya daerah.

- b) Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, termasuk dengan jaringan Multinational Corporation (MNC) terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya.
 - c) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas (Metrology, Standardization, Testing, and Quality/MSTQ); serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.
9. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendukung perekonomian daerah agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi. Upaya tersebut diselenggarakan melalui :
- a) Penguatan posisi daerah di dalam berbagai forum kerja sama perdagangan internasional untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor, sekaligus mengamankan kepentingan strategis dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan pedesaan, dan perlindungan aktifitas perekonomian daerah dari persaingan dan praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.
 - b) Pengembangan citra, standar produk barang dan jasa yang berkualitas internasional, dan fasilitasi perdagangan internasional yang berdaya saing.
10. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk mendukung dan memperkuat sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan:
- a) Berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat.
 - b) Terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah dalam satu ekonomi nasional dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri.
 - c) Meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah.
 - d) Terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.
11. Jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan nasional agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing global dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan sesuai dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian daerah, dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan SDM di dalam negeri dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung kepentingan daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian.
12. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, peningkatan citra Lampung yang positif melalui TRI CITRA (Aman,

kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

18. Keuangan daerah dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis, melalui implementasi sistem Jaringan Pengaman Sektor Keuangan, peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam pendanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan. Dengan demikian, setiap jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.
19. Perbaiki pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dengan dukungan sistem informasi berbasis IT yang handal. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman, sementara sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik, serta ekonomi dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
20. Pengembangan energi diarahkan dengan mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi dan menginternalisasikan biaya lingkungan, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Pembangunan energi terus diarahkan pada penganekaragaman energi, konservasi energi, dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi yang optimum bagi tiap jenis energi (minyak bumi, gas alam, batubara, energi baru dan terbarukan). Diantara energi terbarukan, perhatian yang khusus perlu diberikan pada pengembangan bio-energi, khususnya biofuel (bahan bakar nabati/BBN).
21. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan konsumsi air dengan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya air terukur dengan parameter efisiensi, ekonomi, keadilan, dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

4.2.2 Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

1. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggi di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
2. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain: memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi masing-masing kota.
3. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah pedesaan merupakan backward linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu Sistem Wilayah Pengembangan Ekonomi. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (non-pertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.
4. Pembangunan pedesaan didorong melalui: pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian; peningkatan kapasitas SDM di pedesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan pedesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan social capital dan human capital yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.
5. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Hal ini terjadi karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan rencana tata ruang sebagai

menciptakan mekanisme pendanaan untuk menunjang investasi dan operasi prasarana dan sarana transportasi; bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan pada masyarakat; mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang melalui pembangunan jalan bebas hambatan Trans Sumatera, promosi angkutan barang melalui kereta api, promosi angkutan barang antar pulau dengan sistem Ro-Ro, promosi angkutan komoditi khusus dengan pesawat terbang (fresh good and high value).

10. Pembangunan pemukiman (perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya) diarahkan pada :

- a) Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien.
- b) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.
- c) Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

11. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada :

- a) Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerah dan keandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan daerah dan nasional yang memadai melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru terutama listrik non 66 M.
- b) Penyempurnaan struktur industri penyediaan tenaga listrik, yang memberikan peluang lebih luas bagi investasi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, dan terarah serta terpisah dari misi sosial, dan bagi badan usaha milik negara, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat untuk wilayah non komersial.
- c) Penyempurnaan kebijakan tarif dan subsidi; penyempurnaan tarif diarahkan pada penerapan tarif regional yang strukturnya disesuaikan dengan Harga Pokok Produksi (HPP) bagi setiap kelompok pelanggan. Sedangkan subsidi diarahkan pada optimalisasi dan pengembangan interkoneksi jaringan penyaluran yang lebih luas dan lebih optimal untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi hambatan penyaluran serta mengurangi berbagai bentuk losses.
- d) Peningkatan manajemen usaha penyediaan tenaga listrik; good governance, kemampuan manajemen dan penataan sistem organisasi, serta memperkecil pengaruh intervensi politik dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional.

2. Pembangunan IPTEKS diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan seni, serta pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas IPTEKS yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, dengan memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Pengembangan IPTEKS untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan IPTEKS dalam rangka mendukung daya saing secara global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas IPTEKS di dalam sistem produksi, pengembangan lembaga penelitian yang memiliki kemandirian di dalam pembiayaan, perwujudan sistem pengakuan atas hasil temuan (royalty system, patent, HKI) dan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standar mutu mengacu pada sistem pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana IPTEKS. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan untuk keterkaitan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.
4. Pembangunan IPTEKS diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, teknologi kesehatan, pengembangan teknologi material maju, serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan SDM IPTEKS, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan IPTEKS lintas sektor, perumusan agenda riset selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana IPTEKS, dan pengembangan mekanisme intermediasi IPTEKS. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Disamping itu diupayakan peningkatan kerjasama penelitian domestik dan internasional antar lembaga litbang, perguruan tinggi dan dunia usaha, penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura.
5. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya itu dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEKS, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, serta kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, serta upaya promotif dan preventif.

terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

11. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEKS, dan politik.
12. Pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya olah raga dan prestasi olah raga di kalangan masyarakat.
13. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS, dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penataan Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional (SKSN), serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah rawan bencana.

4.2.4 Membangun Masyarakat ReUgius, Berbudi Luhur, dan Berbudaya, serta Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah

1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
2. Budaya inovatif yang berorientasi IPTEKS terus dikembangkan agar masyarakat Provinsi Lampung menguasai IPTEKS serta mampu berjaya di era persaingan global. Pengembangan budaya IPTEKS tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap IPTEKS melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEKS, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju budaya produktif.
3. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat Lampung ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai-nilai luhur daerah seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri masyarakat Lampung dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah Provinsi Lampung yang

4.2.6 Menegakkan Supremasi Hukum untuk Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban, serta Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis.

1. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Perlindungan terhadap wilayah yurisdiksi laut dilakukan dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum internasional serta dengan meningkatkan kemampuan deteksi dan penangkalan di laut. Perlindungan wilayah yurisdiksi udara ditingkatkan sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan secara menyeluruh dengan membangun sistem pemantauan dan deteksi di wilayah udara serta meningkatkan kemampuan menangkal penebangan illegal.
2. Pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme POLRI beserta institusi terkait dengan masalah ketentraman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.
3. Profesionalisme SDM kepolisian ditingkatkan melalui penyempurnaan seleksi, perbaikan pendidikan dan pelatihan, dan pembangunan spirit of the corps. Peningkatan profesionalisme tersebut diikuti dengan peningkatan bertahap kesejahteraan aparat kepolisian melalui kenaikan penghasilan, penyediaan dan fasilitas rumah tinggal, jaminan kesehatan, dan tunjangan purna tugas. Peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat dibangun melalui mekanisme pemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Penataan peran negara dan masyarakat yang dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan pembentukan kelas menengah yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Penataan peran negara dan masyarakat juga diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak.
5. Penataan proses politik yang dititik beratkan pada proses pengalokasian/representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan:
 - a) Meningkatkan Secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi pejabat politik dan publik.
 - b) Mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

sosial dan disiplin sosial sehingga mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

11. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses pada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.
12. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan padasemua kegiatan pemberian sanksi yang seberat-beratnya pada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip ketata-pemerintahan yang baik.

4.2.7 Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Berorientasi Kewirausahaan, dan Bertatakelola yang Baik.

1. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
2. Peningkatan kerjasama antar daerah kabupaten/kota ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif daerah; menghilangkan ego Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerjasama antar daerah melalui sistem jejaringan antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dari kerjasama, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk pembangunan lainnya.
3. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan

Dalam menjaga momentum kemajuan maka banyak hal yang sudah dibangun pada tiga tahap sebelumnya harus juga disempurnakan sejalan dengan kemajuan yang dicapai agar kemajuan yang telah dicapai dapat dijaga kelangsungannya. Penyegaran metode dan pendekatan pembangunan merupakan semangat yang harus dikedepankan dalam rangka menjaga momentum pembangunan pada jangka panjang berikutnya.

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

